

Membentuk unit kerja multipihak untuk pembangunan rendah emisi dan hutan desa 3 kabupaten di Provinsi Jambi

Oleh: Rachman Pasha



Unit Kerja LUMENS dan Hutan Desa Kab.Merangin sedang mengikuti pelatihan yang diadakan oleh ICRAF



Posisi Unit Kerja Hutan Desa/LUWES/LUMENS pada POKJA RAD-GRK Kabupaten

Suasana pelatihan hari terakhir siang itu berjalan serius sambil sesekali diselengi oleh gelak dan tawa dari para peserta yang hadir. Tak terlihat ekspresi kelelahan ataupun bosan dari raut wajah setiap orang yang ada. Hari itu, tanggal 6 Juni 2014 bertempat di salah satu hotel di kawasan Dago, Kota Bandung yang merupakan hari terakhir dari rangkaian lima hari lokakarya dan pelatihan Perhitungan *Reference Emission Level* (REL) untuk menyusun Rencana Aksi Daerah dalam menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) dari sektor berbasis lahan yang terintegrasi pada tingkat provinsi dan kabupaten bagi segenap perwakilan pemerintah daerah dari seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Pelatihan kali itu terasa berbeda dengan pelatihan-pelatihan serupa sebelumnya yang pernah dilakukan. Pelatihan *Land use planning for multiple environmental services* (LUMENS) kali ini juga merupakan titik awal pembentukan unit kerja teknis Hutan Desa dan LUMENS bagi tiga kabupaten dalam implementasi proyek Margaret A. Cargill Foundation (MACF),

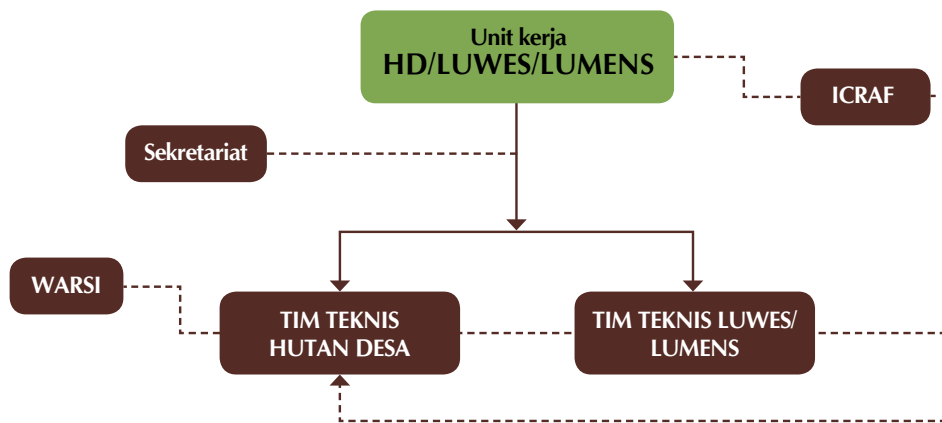
yaitu Merangin, Batang Hari dan Muara Bungo.

Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang peneliti ICRAF yang banyak menekuni isu di bidang hutan desa dan tata kelola lahan dan hutan, Putra Agung menuturkan bahwa salah satu kunci sukses terhadap inisiatif pembangunan rendah emisi dan hutan desa di tingkat lokal ditentukan oleh keberadaan dan kesiapan kelembagaan daerah dalam mendukung dan memfasilitasi berbagai proses yang ada. Berangkat dari pernyataan tersebut, muncullah kebutuhan untuk membentuk suatu wadah atau kelembagaan yang mampu mengkoordinasikan para pihak di daerah untuk memfasilitasi dan mempercepat proses penyusunan Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) serta mempersiapkan dokumen strategi pembangunan rendah emisi kabupaten secara partisipatif.

Pembentukan unit kerja ini pada dasarnya adalah salah satu bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dari tiga kabupaten yang dikoordinasi oleh Badan Pembangunan dan

Perencanaan Daerah (BAPPEDA) dengan World Agroforestry Centre (ICRAF) untuk merumuskan usulan kebijakan tata guna lahan dan hutan serta untuk memfasilitasi kemitraan para pihak dalam mendukung aksi mitigasi daerah melalui implementasi hutan desa guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, efisien dan berkelanjutan. Unit kerja yang dimaksud adalah suatu unit kerja yang merupakan bagian dari kelompok kerja (POKJA) RAD-GRK berbasis lahan di kabupaten yang dikoordinir oleh Dinas Kehutanan setempat. Oleh karena itu, anggota unit kerja ini juga merupakan individu yang sama dengan anggota POKJA-RAD walaupun tidak menutup kemungkinan diisi oleh personil lain guna memperkuat analisa dan POKJA-RAD GRK itu sendiri.

"Hal yang paling penting adalah anggota unit kerja tersebut diharapkan paham tentang tahapan implementasi hutan desa dan konsep aksi penurunan emisi dari sektor berbasis lahan berikut dengan kebijakan-kebijakan nasional-daerah yang mendukung implementasi kedua isu tersebut" tutur Agung lagi.



Bagan unit kerja yang merupakan bagian dari POKJA-RAD GRK berbasis lahan



Andri Yuzhar

Sekretaris Dinas Kehutanan Batanghari, Andri Yuzhar S.Hut menyatakan “keberadaan unit kerja ini akan membantu pemerintah

kabupaten dalam memberikan rekomendasi tentang pilihan-pilihan strategi dan skenario dalam melakukan implementasi pembangunan rendah

emisi kabupaten sekaligus mendorong dan mempercepat proses Hutan Desa yang ada saat ini sebagai bagian dari salah satu bentuk aksi mitigasi dari sektor kehutanan yang melibatkan partisipasi masyarakat”. Lebih jauh lagi Andri menjelaskan bahwa “unit kerja ini terdiri dari 5-10 orang yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah berbasis lahan dan terbagi ke dalam dua unit teknis, yaitu: tim teknis LUMENS dan tim teknis Hutan Desa. Dalam pelaksanaannya, unit kerja ini

didampingi oleh ICRAF dan WARSII sebagai mitra kunci yang memiliki kapasitas dalam hal pembangunan rendah emisi dan Hutan Desa”.

Dengan berbekal kapasitas teknis yang matang, ke depannya POKJA ini diharapkan mampu menyediakan berbagai dokumen dan data informasi yang dibutuhkan terkait dengan aktifitas penggunaan lahan untuk mendorong terciptanya pengelolaan lahan dan hutan yang lebih baik bagi tiap-tiap kabupaten contoh. “Lahirnya unit kerja ini diharapkan dapat menjadi katalisator berkembangnya pemikiran mengenai pembangunan rendah emisi khususnya pada kegiatan berbasis lahan dan mengawal proses penguatan Hutan Desa yang saat ini sedang berjalan. POKJA juga dapat menjadi tempat untuk mengembangkan kapasitas para anggota, berbagi pengetahuan, penggalan data dan informasi serta forum-forum diskusi yang berguna untuk membantu proses kegiatan pembangunan di tiga kabupaten model” tutup Agung mengakhiri diskusi kopi kami sore itu.

Penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami dan menyusun aturan lokal untuk menyongsong pengelolaan hutan desa

Oleh: Herma Yulis*

Konsep otonomi daerah memberikan harapan baru dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat hingga tingkat desa. Konsep ini tertuang dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Revisi kedua UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sebelumnya UU No. 22 Tahun 1999. Perubahan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik, memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan perbaikan di berbagai sektor. Mulai dari peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, pemerataan pembangunan, keistimewaan daerah, serta terbukanya



Peserta simulasi penyusunan lokalatih peraturan desa (foto: KKI WARSII)